

**IMPLIKASI PASAL 86 STATUTA ROMA
TERHADAP KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA
(Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan
Presiden Vladimir Putin dari *International Criminal Court*)**

ABSTRAK

Dugaan deportasi anak-anak di Ukraina yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia mendorong ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah dikeluarkannya surat tersebut sejumlah pihak mengkritik dan menolak untuk melaksanakan surat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Pasal 86 Statuta Roma terhadap kewajiban negara anggota dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dan mengetahui apakah surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari aspek dugaan kejahatan yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan Statuta Roma sebagai bahan hukum primer dan perjanjian internasional yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 86 memberikan kewajiban bagi negara anggota ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, meskipun negara bisa saja menolak apabila dengan alasan keamanan nasional. Sulitnya pelaksanaan surat tersebut sehingga memerlukan adanya amandemen yang mengatur mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara. Selanjutnya, surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan dugaan kejahatan yang terjadi memiliki bukti yang cukup dan adanya keyakinan dari jaksa sehingga surat tersebut sah, akan tetapi diperlukan upaya memberi kesempatan pada Pemerintah Rusia untuk menjelaskan duduk perkara agar dapat mencapai kesepakatan mengenai pengembalian anak-anak tersebut.

Kata Kunci: Kewajiban Negara Anggota, Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin, Statuta Roma 1998.

***IMPLICATIONS OF ARTICLE 86 OF THE ROME STATUTE
TOWARDS THE OBLIGATIONS OF STATE PARTIES***

(Case Study The Arrest Of Warrant President Vladimir Putin

From The International Criminal Court)

ABSTRACT

Allegations of the deportation of children in Ukraine by the Russian Government prompted the ICC to issue an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. After issuing the arrest warrant, a number of parties criticized it and refused to carry out the arrest warrant. This study aims to find out how Article 86 of the Rome Statute is disclosed regarding the obligations of member states in implementing the arrest warrant against President Vladimir Putin and whether the arrest warrant is in accordance with the specific provisions of the alleged crimes committed. This type of research is juridical-normative research using the Rome Statute as the main legal material and international agreements related to research. The conclusion of this study shows that Article 86 provides an obligation to ICC member states to carry out arrest warrants, although states may refuse if for reasons of national security. It is difficult to implement the arrest warrant so that it requires an amendment that regulates the implementation of arrest warrants against heads of state. Furthermore, the arrest warrant is in accordance with the provisions and the alleged violation that occurred has sufficient evidence and there is confidence that the arrest warrant is valid, but efforts are needed to give the Russian Government an opportunity to explain the situation so that the case can reach an agreement regarding the return of the children.

Keywords: Obligations of States parties, Arrest of Warrant Against Vladimir Putin, Rome Statute 1998.